

Strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam Menindaklanjuti Temuan Hasil Audit Internal terhadap Perangkat Daerah di Kota Palembang

The Palembang City Inspectorate's Strategy for Following Up on Findings From Internal Audits of Local Government Agencies in Palembang

Nining Widyasti, Maulana , Bachtari Alam Hidayat 

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang, Palembang, Indonesia

Abstrak

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuntut penguatan pengawasan internal, khususnya dalam tindak lanjut temuan audit. Data Inspektorat Daerah Kota Palembang menunjukkan peningkatan signifikan temuan yang belum ditindaklanjuti dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal terhadap perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan sembilan orang informan yang terdiri dari pejabat dan auditor Inspektorat serta perwakilan perangkat daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) strategi tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan rencana aksi, penetapan batas waktu, dan monitoring berkala; (2) komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi faktor kunci keberhasilan penyelesaian temuan; (3) keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah menjadi hambatan utama; serta (4) peningkatan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti mencerminkan belum optimalnya sistem pengendalian internal. Implikasi praktis penelitian ini menekankan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, serta pengembangan sistem monitoring berbasis kinerja untuk mempercepat dan memastikan efektivitas tindak lanjut temuan audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kata Kunci

Audit Internal; Inspektorat Daerah; Perangkat Daerah; Strategi.

Abstract

Improving transparency and accountability in local financial management requires strengthening internal oversight, particularly regarding the follow-up on audit findings. Data from the Palembang City Inspectorate shows a significant increase in unresolved findings from 2022 to 2024, necessitating more effective strategies. This study aims to analyze the strategies of the Palembang City Regional Inspectorate in following up on findings from internal audits of local government agencies and to identify supporting and

DOI

[10.63892/aletheia.3.2026.61-69](https://doi.org/10.63892/aletheia.3.2026.61-69)

Tanggal Diajukan

22 Januari 2026

Tanggal Diterima

24 Maret 2026

Tanggal Diterbitkan

3 Juni 2026

Penulis Korespondensi

Bachtari Alam Hidayat
bachtari@unitaspalembang.ac.id

© Penulis 2026



Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

inhibiting factors. The study employs a descriptive qualitative design with nine informants comprising officials and auditors from the Inspectorate as well as representatives from local government agencies. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, followed by qualitative data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with validity testing via triangulation. The research findings indicate that: (1) follow-up strategies are implemented through the development of action plans, setting deadlines, and periodic monitoring; (2) the commitment of local government agency leaders is a key factor in the successful resolution of findings; (3) limited human resources and weak coordination among local government agencies are the main obstacles; and (4) the increase in the number of unresolved findings reflects the suboptimal state of the internal control system. The practical implications of this study emphasize strengthening leadership commitment, enhancing the capacity of oversight personnel, and developing a performance-based monitoring system to expedite and ensure the effectiveness of follow-up actions on internal audit findings within the Palembang City Government.

Keywords

Internal Audit; Regional Apparatus; Regional Inspectorate; Strategy.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu tuntutan utama dalam era reformasi birokrasi. Dalam konteks tersebut, pengawasan internal menjadi instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lathifah dkk., 2024). Inspektorat Daerah Kota Palembang memiliki peran dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pelaksanaan audit internal pada perangkat daerah. Audit internal tidak hanya berfungsi menilai kinerja dan kepatuhan, tetapi juga mengidentifikasi potensi penyimpangan, pemborosan, dan kelemahan sistem pengendalian internal (Hasmal dkk., 2025).

Namun demikian, temuan audit bukanlah akhir dari proses pengawasan, melainkan titik awal perbaikan tata kelola. Efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas dan kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi audit (Putri dkk., 2025). Temuan yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi menimbulkan temuan berulang, melemahkan sistem pengendalian internal, serta menurunkan kualitas pengelolaan anggaran daerah (Iqbal dkk., 2025). Tindak lanjut audit merupakan bagian integral dari siklus pengawasan yang menentukan keberhasilan fungsi audit internal (Ardian dkk., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi tindak lanjut audit, seperti komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pemantauan dan evaluasi (Dewi & Nugrahati, 2021; Tehuayo & Leiwakabessy, 2025). Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menegaskan kewajiban penyelesaian tindak lanjut sebagai bagian dari penguatan SPIP. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada tingkat kepatuhan atau persentase penyelesaian rekomendasi audit, dan belum secara komprehensif memetakan strategi tindak lanjut sebagai suatu mekanisme tata kelola yang terintegrasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memetakan strategi tindak lanjut temuan audit sebagai *governance mechanism* yang mencakup tiga dimensi utama: (1) *monitoring*, melalui penyusunan rencana aksi dan pemantauan berkala; (2) *escalation*, melalui mekanisme penegasan tanggung jawab dan pelaporan berjenjang; serta (3) *capacity building*, melalui pembinaan dan penguatan kapasitas perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini menjelaskan secara lebih mendalam *bottleneck* koordinasi lintas-bagian antara Inspektorat dan perangkat daerah yang menghambat efektivitas penyelesaian temuan audit. Pendekatan ini memperluas perspektif dari sekadar kepatuhan administratif menuju analisis tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal sebagai mekanisme tata kelola pemerintahan daerah, dan faktor pendukung dan penghambatnya. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *governance* sektor publik dengan menempatkan tindak lanjut audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola yang terstruktur dan berlapis. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem monitoring, meningkatkan komitmen pimpinan, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengawasan guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis strategi tindak lanjut temuan audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Palembang. Penelitian dilaksanakan di Inspektorat dan beberapa perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dalam rentang waktu September 2025-Januari 2026. Jumlah informan sebanyak Sembilan orang terdiri dari 1 orang Inspektur, 2 orang Inspektur Pembantu I dan II, 1 orang Auditor Ahli Madya, 1 orang Kasubbag Analisis Evaluasi, 4 orang Perangkat Daerah yang Diperiksa, dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: terlibat langsung dalam proses audit atau tindak lanjut rekomendasi, memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam

pengambilan keputusan, memahami mekanisme koordinasi, serta bersedia memberikan informasi secara komprehensif. Informan terdiri dari pejabat struktural Inspektorat, auditor internal, dan perwakilan perangkat daerah yang menjadi objek audit.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi (laporan hasil audit, rencana aksi, dan laporan monitoring). Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi kepada informan kunci. Data dikumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Monitoring melalui Rencana Aksi dan BAKTL

Strategi utama tindak lanjut temuan audit dilakukan melalui penyusunan rencana aksi dan penggunaan dokumen Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut (BAKTL) sebagai instrumen formal pengikatan komitmen perangkat daerah (OPD). Monitoring dilakukan secara berkala melalui evaluasi progres penyelesaian rekomendasi audit.

Tabel 1. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palembang Periode 2022–2024

Tahun	Total Temuan/ Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindak Lanjut
2022	175	160	13	2
2023	188	129	20	39
2024	211	94	12	105

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Palembang Tahun 2025. Data Diolah. 2025.

Berdasarkan Tabel 1, Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kota Palembang periode 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan audit internal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kondisi ini juga sejalan dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih mencatat adanya rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah yang belum selesai ditindaklanjuti. Evaluasi pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga menekankan bahwa kelemahan utama pengawasan internal daerah terletak pada aspek monitoring dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit. Indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan tindak lanjut audit bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan tantangan tata kelola dan koordinasi kelembagaan.

Berdasarkan wawancara, auditor menyatakan bahwa setiap temuan audit dituangkan dalam rekomendasi yang kemudian dibahas bersama OPD untuk disepakati dalam BAKTL. Dokumen tersebut memuat: uraian temuan, rekomendasi, langkah tindak lanjut, penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian. BAKTL ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili serta Kepala OPD yang bersangkutan. Studi dokumentasi menunjukkan adanya daftar monitoring progres yang diperbarui secara periodik oleh Inspektorat.

BAKTL berfungsi sebagai instrumen governance yang mengikat secara administratif karena memuat komitmen tertulis antara Inspektorat dan OPD. Secara prosedural, setelah Laporan Hasil Audit (LHA) diterbitkan, dilakukan ekspos hasil audit, penyusunan rencana aksi, penandatanganan BAKTL, dan monitoring berkala. Jika OPD tidak patuh atau melewati batas waktu, Inspektorat melakukan eskalasi melalui surat teguran, pemanggilan pimpinan OPD, hingga pelaporan kepada Sekretaris Daerah atau Wali Kota sebagai atasan langsung. Mekanisme ini menunjukkan adanya pola escalation dalam sistem tindak lanjut.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa tindak lanjut audit merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Literatur audit internal menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya terletak pada identifikasi temuan, tetapi pada sistem monitoring dan penegakan akuntabilitas (Permadi & Lamo, 2025). Namun, penelitian ini memperluas perspektif dengan menempatkan BAKTL sebagai mekanisme pengikat tata kelola yang bersifat semi-formal dan berjenjang.

3.2. *Escalation* dan Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah

Komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi faktor kunci keberhasilan penyelesaian tindak lanjut. Ketika pimpinan aktif mengawal proses, penyelesaian cenderung tepat waktu; sebaliknya, rendahnya komitmen berkontribusi pada keterlambatan dan temuan berulang.

Beberapa informan menyebutkan bahwa keterlambatan sering terjadi karena dokumen pendukung belum dilengkapi atau belum ada disposisi dari pimpinan OPD. Dalam beberapa kasus, rekomendasi terkait pengembalian kerugian daerah atau penyesuaian administrasi tidak segera ditindaklanjuti karena kurangnya prioritas dari pimpinan.

Eskalasi formal dilakukan melalui surat peringatan dan rapat klarifikasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada respons pimpinan perangkat daerah. Tanpa dukungan manajerial, tindak lanjut cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh akar masalah. Hal ini menyebabkan temuan yang sama muncul kembali pada audit periode berikutnya (*repeat findings*). *Bottleneck* koordinasi lintas-bagian terjadi ketika unit teknis, bendahara, dan bagian perencanaan tidak terkoordinasi secara efektif dalam menyusun dokumen tindak lanjut.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Tehuayo dan Leiwakabessy (2025) yang menegaskan komitmen pimpinan dalam keberhasilan tindak lanjut audit. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada komitmen individu, tetapi juga pada sistem koordinasi internal perangkat daerah yang belum terintegrasi.

3.3. *Capacity Building* dan Hambatan Nyata dalam Tindak Lanjut

Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas administrasi menjadi hambatan utama dalam penyelesaian tindak lanjut. Hambatan nyata yang ditemukan meliputi keterlambatan penyampaian dokumen, kurangnya pemahaman teknis atas rekomendasi audit, dan rotasi pejabat yang menyebabkan diskontinuitas tindak lanjut.

Informan menyebutkan adanya keterlambatan hingga melewati batas waktu BAKTL karena pejabat penanggung jawab mutasi atau pensiun, sehingga dokumen tidak segera diproses. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang belum memahami tata cara penyusunan bukti dukung sesuai standar audit, sehingga dokumen dikembalikan untuk perbaikan.

Keterlambatan ini berdampak langsung pada munculnya temuan berulang pada periode audit berikutnya. Ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara tuntas, kelemahan sistem pengendalian internal tetap ada dan berpotensi menimbulkan risiko kerugian daerah. Hal ini menunjukkan perlunya *capacity building* berupa pelatihan teknis, pendampingan, dan penguatan sistem dokumentasi digital untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut.

Literatur audit internal menyebutkan bahwa kualitas SDM dan sistem pemantauan menjadi determinan utama efektivitas tindak lanjut (Dewi & Nugrahati, 2021). Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut, sekaligus menambahkan bahwa rotasi jabatan dan lemahnya manajemen pengetahuan organisasi menjadi faktor struktural yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

Strategi tindak lanjut temuan audit di Inspektorat Daerah Kota Palembang dapat dipetakan sebagai *governance mechanism* yang terdiri dari: (1) monitoring melalui BAKTL dan evaluasi berkala, (2) *escalation*

melalui mekanisme teguran dan pelaporan berjenjang, serta (3) capacity building melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi. Namun, *bottleneck* koordinasi lintas-bagian dan keterbatasan kapasitas SDM masih menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas penyelesaian tindak lanjut dan berkontribusi pada temuan berulang.

Inspektorat Daerah Kota Palembang memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap temuan hasil audit internal terhadap perangkat daerah ditindaklanjuti dengan tepat dan efisien. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan berfokus pada tujuan yang jelas, kebijakan yang terstruktur, serta tahapan tindakan yang berkelanjutan. Menurut [Winardi dan Nisjar \(2003\)](#), strategi yang baik harus mencakup tiga komponen utama: tujuan yang jelas, kebijakan yang mendukung, serta tahapan tindakan yang terstruktur dan terukur. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Palembang menekankan tujuan utama yang terukur, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit diimplementasikan dengan baik oleh perangkat daerah.

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan setiap temuan audit internal diterjemahkan menjadi langkah-langkah perbaikan yang nyata, bukan sekadar laporan administratif. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran di lingkungan perangkat daerah ([Hidayat, 2022](#)). Untuk mencapai tujuan ini, Inspektorat Daerah Kota Palembang merancang pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan melalui tim pemantauan tindak lanjut, yang secara berkala menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan temuan Inspektorat yang menginformasikan sejauh mana temuan telah ditindaklanjuti. Inspektorat dapat mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat [Winardi dan Nisjar \(2003\)](#), yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran dalam strategi harus dapat diukur secara objektif.

Penelitian terdahulu oleh [Nasution dan Faridani \(2025\)](#) juga menggarisbawahi pemantauan yang berkelanjutan dalam strategi tindak lanjut audit. Penelitian ini menemukan bahwa daerah yang memiliki sistem pemantauan yang baik dapat lebih cepat menanggapi temuan audit dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Strategi yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Palembang yang melibatkan pemantauan temuan audit secara berkala adalah langkah yang tepat dalam memastikan implementasi rekomendasi audit yang efektif.

Selain itu, dalam tahap implementasi, Inspektorat Daerah Kota Palembang menekankan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan perangkat daerah. Wawancara yang dilakukan dengan Inspektur dan beberapa pejabat Inspektorat lainnya mengungkapkan bahwa komunikasi yang jelas mengenai tujuan tindak lanjut agar perangkat daerah dapat memahami rekomendasi audit dengan lebih baik. Penelitian oleh [Putri dkk. \(2025\)](#) juga menjelaskan peran komunikasi yang efektif dalam keberhasilan tindak lanjut audit. Banyak daerah mengalami kendala dalam implementasi rekomendasi audit akibat kesalahpahaman antara auditor dan perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Palembang memastikan bahwa ada komunikasi yang terus-menerus antara Inspektorat dan perangkat daerah agar semua pihak memahami rekomendasi audit dengan jelas dan melaksanakannya dengan tepat waktu.

Inspektorat Daerah Kota Palembang mengembangkan strategi yang jelas dan terstruktur untuk menindaklanjuti temuan audit internal. Salah satu prinsip utamanya adalah pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh tim pemantauan tindak lanjut. Hal ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh [Winardi dan Nisjar \(2003\)](#), yang menyatakan bahwa strategi yang efektif harus mencakup tujuan yang jelas, kebijakan yang mendukung, serta tahapan tindakan yang terukur. Penelitian oleh [Dewi dan Nugrahati \(2021\)](#) juga menyoroti pemantauan yang berkelanjutan dalam strategi tindak lanjut audit. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa daerah dengan sistem pemantauan yang baik dapat merespons lebih cepat terhadap temuan audit dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Ini mendukung bahwa strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang yang melibatkan pemantauan berkelanjutan adalah langkah yang tepat dan efektif.

Sedangkan penelitian [Matei dkk. \(2017\)](#) lebih fokus pada pengoptimalan fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada mekanisme tindak lanjut audit internal yang terstruktur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua penelitian berfokus pada pengawasan, Palembang memberikan perhatian lebih pada sistem pemantauan dan komunikasi yang spesifik untuk tindak lanjut audit interna.

Dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal, terdapat berbagai faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang. Faktor pertama yang sangat berperan adalah komitmen dari pimpinan perangkat daerah. Komitmen pimpinan yang kuat akan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit diprioritaskan dan dilaksanakan dengan serius. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh [Tehuayo dan Leiwakabessy \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik di tingkat perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan tindak lanjut audit. Tanpa komitmen dari pimpinan, rekomendasi audit sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup, yang pada akhirnya menghambat perbaikan yang diharapkan.

Faktor pendukung kedua adalah penggunaan teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memantau tindak lanjut temuan audit terbukti dapat mempercepat proses evaluasi dan meminimalkan keterlambatan administratif. Penelitian oleh [Dewi dkk. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang efisien dapat mengatasi kendala administratif yang sering menghambat proses tindak lanjut audit.

Inspektorat Daerah Kota Palembang menggunakan teknologi untuk memantau tindak lanjut audit secara real-time, yang memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini mencerminkan penerapan sistem manajemen yang transparan dan efisien, yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan strategi tindak lanjut audit. Selanjutnya, pengelolaan data yang baik juga merupakan faktor pendukung dalam strategi Inspektorat. Proses dokumentasi dan pengelolaan data yang terstruktur memudahkan Inspektorat untuk mengevaluasi sejauh mana rekomendasi audit telah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat [Winardi dan Nisjar \(2003\)](#), yang menyatakan bahwa manajemen informasi yang baik adalah kunci dalam strategi yang efektif. Inspektorat Daerah Kota Palembang memastikan bahwa data dan dokumen terkait tindak lanjut audit dikelola dengan baik dan dapat diakses dengan mudah untuk memantau progres tindak lanjut. Namun, di balik faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut audit. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa keterbatasan staf yang terlatih di perangkat daerah sering kali memperlambat proses tindak lanjut. Penelitian oleh [Nuwa dkk. \(2026\)](#) mengungkapkan bahwa perangkat daerah sering kali kekurangan staf yang memiliki pemahaman teknis terhadap rekomendasi audit, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam implementasi tindak lanjut. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat perangkat daerah sangat diperlukan untuk mempercepat tindak lanjut audit ([Hidayat dkk., 2023](#)).

Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya koordinasi antar bagian di perangkat daerah. Wawancara dengan beberapa perangkat daerah yang diperiksa mengungkapkan bahwa koordinasi yang kurang baik antara unit yang berbeda di perangkat daerah sering kali memperlambat penyelesaian tindak lanjut. Penelitian oleh [Budianto dkk. \(2025\)](#) juga menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk antara berbagai bagian dalam perangkat daerah dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi audit. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi dan komunikasi internal di perangkat daerah untuk memastikan tindak lanjut audit berjalan dengan lancar ([Nabila dkk., 2025](#)).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal telah dirancang dengan baik, dengan tujuan yang jelas dan kebijakan yang terstruktur. Pemantauan yang berkelanjutan dan komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam

keberhasilan strategi ini. Meskipun demikian, faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan koordinasi antar perangkat daerah masih menjadi tantangan utama.

Untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit, diperlukan penguatan kapasitas teknis dan administratif di tingkat perangkat daerah serta peningkatan koordinasi antar bagian. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengelolaan data yang baik, penggunaan teknologi yang efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang perlu diperkuat agar strategi tindak lanjut audit dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam menindaklanjuti temuan audit internal dijalankan melalui tiga mekanisme tata kelola utama: *Monitoring*, melalui penyusunan rencana aksi dan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut (BAKTL) yang memuat komitmen, batas waktu, dan penanggung jawab; *Escalation*, melalui surat teguran, rapat klarifikasi, hingga pelaporan berjenjang kepada Sekretaris Daerah atau Wali Kota apabila perangkat daerah tidak patuh; *Capacity building*, melalui pendampingan teknis, verifikasi bukti tindak lanjut, serta pemantauan berkala (per semester). Kedua, faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut meliputi komitmen pimpinan OPD sebagai faktor kunci keberhasilan, sementara hambatan utama berupa keterbatasan pemahaman teknis, rotasi pejabat, keterlambatan penyampaian dokumen, serta lemahnya koordinasi lintas-bagian. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya temuan berulang dan belum optimalnya sistem pengendalian internal.

Beberapa rekomendasi operasional dapat dirumuskan: (1) *Desain Dashboard Monitoring Tindak Lanjut* dengan mengembangkan sistem informasi terintegrasi berbasis kinerja yang menampilkan status temuan (*open, on progress, closed*), batas waktu, tingkat risiko, dan potensi temuan berulang. Dashboard dapat diakses oleh Inspektorat, Sekretaris Daerah, dan pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (2) SOP Eskalasi Berjenjang dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan eskalasi yang jelas: pengingat → surat teguran I → teguran II → rapat klarifikasi → pelaporan kepada pimpinan daerah. Penetapan batas waktu standar (30–60 hari) agar tidak terjadi ketidakpastian penyelesaian. (3) Modul Pelatihan Berbasis Temuan (*Findings-Based Training Module*) dengan mengembangkan pelatihan teknis yang berbasis pada pola temuan yang paling sering muncul. Materi mencakup penyusunan bukti dukung, tata kelola administrasi keuangan, serta manajemen risiko internal. Pelatihan diarahkan untuk mencegah temuan berulang, bukan sekadar memperbaiki kesalahan administratif. (4) Penguatan Komitmen Pimpinan perangkat daerah melalui integrasi indikator penyelesaian tindak lanjut ke dalam evaluasi kinerja kepala perangkat daerah. Pemberian reward dan disinsentif berbasis tingkat kepatuhan tindak lanjut.

Implikasi ini menegaskan bahwa tindak lanjut audit harus diposisikan sebagai mekanisme *governance* yang sistemik, bukan sekadar kewajiban administratif. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas membuat hasil penelitian bersifat kontekstual pada Inspektorat Daerah Kota Palembang. Kedua, penelitian belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara tingkat penyelesaian tindak lanjut dengan indikator kinerja keuangan daerah atau opini audit eksternal. Ketiga, analisis belum mengevaluasi efektivitas teknologi informasi yang digunakan dalam sistem pemantauan. Agenda riset lanjutan dapat diarahkan pada studi kuantitatif untuk menguji pengaruh tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap penurunan temuan berulang atau peningkatan opini audit. Analisis komparatif antar daerah untuk mengidentifikasi model tindak lanjut yang lebih efektif. Pengembangan model integratif yang menghubungkan sistem pengendalian internal, kepemimpinan birokrasi, dan teknologi monitoring dalam satu kerangka evaluatif.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Maulana, S.E, M.M selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Bachtari Alam Hidayat, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing kedua sekaligus Kaprodi MIP Tamansiswa Palembang yang telah membimbing penulis dalam pelaksanaan penelitian.

Referensi

- Ardian, N., Adinda Azahara, L., Mardiah Putri, A., Wahyuni, N., Novika Br Bukit, E., Eryanti, L., Studi Manajemen, P., Kunci, K., Kerja, B., Kerja, H., Kerja, F., & Kerja, P. (2025). Tahap Tindak Lanjut (Follow-Up). *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 169–182.
- Budianto, A., Firmansyah, A., Trisakti, U., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2025). Penguatan Peran APIP dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Akuntansiku*, 4(1), 94–107.
- Dewi, A. K., Sibarani, B. K., Saputra, E., Norazlina, N., Susanti, S., Syafira, Y., & Munakalla, Y. (2025). Strategi Efektif Pengendalian Internal dalam Keamanan Sistem Informasi Akuntansi untuk Perlindungan Data Keuangan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 138–148. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.838>
- Dewi, M., & Nugrahati, T. P. (2021). Audit Findings Sebagai Mekanisme Perubahan pada Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Hasmal, A. S., Syahra, A., & Masyhuri, M. (2025). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Keandalan Pengelolaan Aset Tetap melalui Efektivitas Pengendalian Internal pada Entitas Bisnis. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(2), 63–71. <https://doi.org/10.65310/n9qqqf46>
- Hidayat, B. A. (2022). Perubahan Paradigma Government menjadi Governance. In *Good Governance* (pp. 1–14). CV. Media Sains Indonesia.
- Hidayat, B. A., Razak, M., Mustanir, A., & Wismayanti, Y. F. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah (Teori, Konsep, dan Praktek)*. Media Sains Indonesia.
- Iqbal, M. A., Wardani, M. K., Setiawan, A., & Azhar, F. A. (2025). Peran Penyelesaian Temuan Audit, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, dan Penggunaan E-procurement terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 314–334. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i1.1459>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik dalam Sistem Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Professional*, 11(2), 585–592.
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 86–96. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>
- Nabila, P., Maulina, I., & Islam. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Public. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- Nasution, M. I., & Faridani, M. R. (2025). Dilema Audit Kinerja: Antara Pengawasan Seremonial dan Perbaikan Nyata. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(3), 647–660. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.235>
- Nuwa, F., Rambu, I., Dja, R., Maia, N., & De Jesus, M. (2026). Analisis Efektivitas dan Kendala Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(6). <https://doi.org/10.55904/FJKN2R37>
- Permadi, I., & Lamo, M. L. (2025). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 01–11.
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairini, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 438–443.
- Tehuayo, D. B., & Leiwakabessy, A. (2025). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Hasil Audit oleh Inspektorat Daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*, 4(1), 117–125.
- Winardi, & Nisjar, K. (2003). *Strategi Manajemen*. Mandar Maju.